

POLA INTERELASI DAN PENGEMBANGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) DI WILAYAH PEDESAAN JAWA TIMUR

Djoko Soejono¹, Dimas Bastara Zahrosa¹, Ariq Dewi Maharani¹ dan Sasmita Sari²

¹Program Studi Agribisnis Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember, Jember

²Program Studi Agribisnis Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email Korespondensi: dimaszahrosa.faperta@unej.ac.id

Abstrak

Kebijaksanaan pengelolaan irigasi tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran serta lembaga pengelola irigasi yang tergabung dalam wadah Himpunan Petani Pengelola Air (HIPPA). Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pola interelasi lembaga HIPPA dengan lembaga lain di wilayah pedesaan; dan (2) strategi pengembangan lembaga HIPPA di wilayah pedesaan. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitis dengan Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* di Jawa Timur. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) *Interelasi* HIPPA dengan Kelompok Tani, *Interelasi* HIPPA dengan Dinas PU, Kelompok Tani dan Dinas Pertanian, *Interelasi* HIPPA dengan Kelompok Tani dan BPD, *Interelasi* HIPPA dengan Pemerintah Desa, BPD dan Dinas PU, *Interelasi* HIPPA dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Tradisional, serta *Interelasi* antara HIPPA dengan Dinas PU dan Dinas PU Prov. Jatim. (2) Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberi kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan kuarter kepada HIPPA yang berbadan hukum merupakan langkah awal bagi lembaga tersebut untuk mulai bebenah diri dari sisi organisasi maupun finansial.

Kata kunci : HIPPA, Interelasi dan Pengelolaan Irigasi,

Abstract

The irrigation management policy is to increase the efficiency and effectiveness of irrigation management by increasing the participation of irrigation management institutions that are members of the Water Management Farmers Association (HIPPA). The aims of this study were (1) to find out the pattern of interrelationship between HIPPA institutions and other institutions in rural areas; and (2) strategy for developing HIPPA institutions in rural areas. The method in this study is a descriptive and analytical method with the method of determining the research area carried out purposively methods in East Java. From the results of the research conducted, it can be concluded that (1) Interrelation between HIPPA and Farmer Groups, Interrelation between HIPPA and Public Works Services, Farmers' Groups and the Agriculture Service, Interrelation between HIPPA and Farmers' Groups and BPD, Interrelation between HIPPA and Village Government, BPD and Public Works Service, Interrelation with HIPPA with Village Administration and Traditional Institutions, as well as Interrelation between HIPPA and the Public Works Service and the Prov. East Java (2) The Provincial Government of East Java gives authority to manage tertiary and quaternary irrigation networks to HIPPA which is a legal entity, which is the first step for the institution to begin to improve itself both organizationally and financially.

Keywords : HIPPA, Interrelation and irrigation management

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk adalah faktor faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap air dimasa depan. Ada tiga kecenderungan

yang diperkirakan akan terjadi; Pertama, permintaan air dari luar sektor pertanian akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan permintaan air sektor pertanian. Kedua, pergeseran permintaan terhadap komoditi pertanian akan menyebabkan pergeseran permintaan terhadap air di dalam sektor pertanian. Ketiga, pergeseran permintaan terhadap lahan juga akan mempengaruhi permintaan terhadap air (Nelvi, 2019). Potensi setiap wilayah berbeda, sehingga dibutuhkan pengembangan potensi wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Amam et al., 2021).

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang mempunyai fungsi sosial; terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional; adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan sektor-sektor lain; dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif, sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin (Indonesia, 2006). Kebutuhan air irigasi secara keseluruhan perlu diketahui karena merupakan salah satu tahap penting yang diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem irigasi (Priyonugroho, 2014).

Arah perkembangannya, air secara sangat cepat menjadi sumberdaya yang makin langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya. Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan air baku meningkat secara drastis. Masalah kualitas air semakin mempersempit alternatif sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat (Samekto & Winata, 2010). Menunjang perkembangan sumberdaya air, pembangunan infrastruktur sumberdaya air menjadi penunjang atau pendukung pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan pertanian pada umumnya memerlukan dukungan yang pasti dari infrastruktur sumberdaya air, khususnya irigasi untuk menyediakan air bagi pemenuhan kebutuhan usahatani (Dharma, 2013). Sejalan dengan Implementasi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka peningkatan kinerja penunjang pertanian di bidang pengairan, telah dilakukan langkah-langkah pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi. Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah ialah berupa otonomi desa, yaitu desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri dan adaptif (Fatimah, 2018).

Titik tolak pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran serta lembaga pengelola irigasi yang tergabung dalam wadah Himpunan Petani Pengelola Air (HIPPA) yang otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga terwujud sistem irigasi yang berkelanjutan. Perubahan paradigma tersebut, menjadikan petani yang tergabung dalam lembaga pengelola irigasi atau HIPPA diharapkan lebih mampu berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, otonom, berkesinambungan dan berkelanjutan. Zahrosa et al., (2021) menambahkan memperkuat pendapatan desa juga menjadi motor penggerak perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Untuk itu, diperlukan upaya mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi petani dalam pengelolaan irigasi agar lebih efisien dan efektif. Salah satunya melalui studi pengembangan pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pola interelasi lembaga HIPPA dengan lembaga lain di wilayah pedesaan; dan (2) Strategi pengembangan lembaga HIPPA di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik. dengan Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* di Jawa Timur (Nazir, 2014). Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara terbuka dan mendalam (*indept interview*). Data sekunder yang diperoleh dari Dinas PU Kabupaten, Dinas Pertanian kabupaten, Bappekab bagian perekonomian, BPS, pemerintah desa setempat dan sumber data lainnya.

Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah *Two Stage Cluster Sampling*, yaitu teknik memilih sampel dari kelompok unit terkecil (Soetriono & Hanafie, 2007). Penentuan sampling dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Di Jawa Timur terdapat 6.651 HIPPA dengan klasifikasi berkembang/mandiri, sedang berkembang dan belum berkembang, selanjutnya dijadikan sebagai populasi finit; (2) Sampel tahap pertama adalah memilih 30 lembaga HIPPA secara sengaja dari populasi finit di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan. Kriteria pemilihan sampel didasarkan pada (a) aspek sosial budaya masyarakat; (b) ketersediaan sumberdaya air; dan (c) keberadaan sungai lintas; (3) Sampel tahap kedua adalah memilih 5 responden dari setiap lembaga HIPPA, terdiri dari 2 pengurus dan 3 anggota HIPPA.

Data yang telah diperoleh di lapangan akan diedit, untuk selanjutnya dianalisis. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang dan kendala dalam pengelolaan HIPPA di pedesaan digunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) (Rangkuti, 2016). Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) sebagai faktor internal yang menggambarkan potensi kemampuan berorganisasi, pengelolaan dana, manajemen dan administrasi, pengelolaan infrastruktur dan lainnya. Peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) sebagai faktor eksternal yang menggambarkan perangkat hukum, infrastruktur, mekanisme pembinaan dan pengembangan, dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan HIPPA di pedesaan.

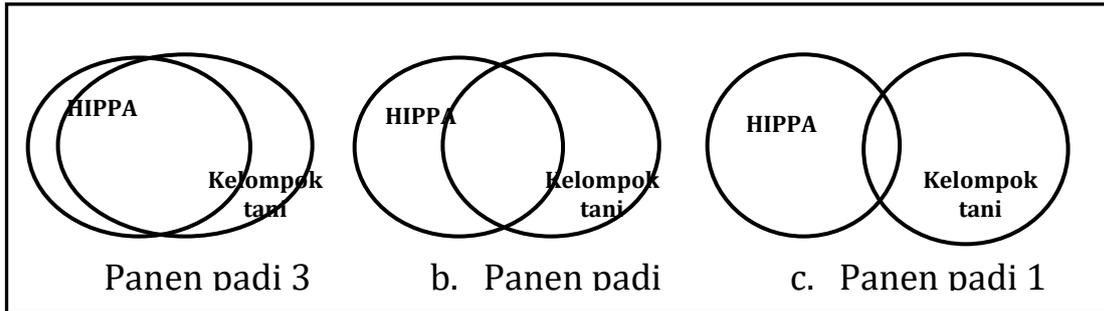
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Interelasi Lembaga HIPPA dengan Lembaga Lain di Pedesaan

HIPPA sebagai lembaga mandiri yang dibentuk oleh para petani yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan air irigasi secara efisien dan efektif guna mendukung pertanian berwawasan agribisnis dan agroindustri di tingkat lokalita. Berbagai komoditas pertanian yang sesuai untuk dikembangkan pada lahan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan, termasuk usaha peternakan (Sari et al., 2020). Dalam aktivitasnya, tidak terlepas dari interelasi dengan instituti lain yang melingkupinya, antara lain lembaga milik pemerintah dan lembaga sosial ekonomi lain yang berada di pedesaan. Bentuk-bentuk interelasi antara HIPPA dengan institusi lain di lokasi studi dijelaskan sebagai berikut:

A. Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani

Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani diilustrasikan pada Gambar 1.



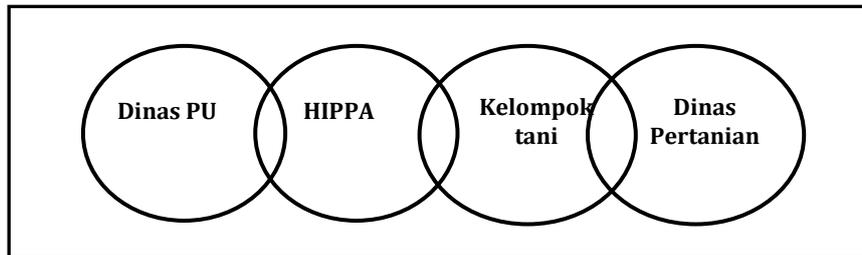
Gambar 1. Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani

Dari berbagai pengalaman yang di peroleh di lokasi studi, bahwa kekuatan kelompok tani sangat menentukan keberhasilan pengembangan HIPPA. Kelompok tani sebagai kekuatan yang mendasar merupakan basis integral dari pembangunan pertanian secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat petani (Soetrisno dan soejono, D. dkk, 2021). Keberadaan kelompok tani tidak bisa terpisahkan dengan pembentukan lembaga HIPPA, mengingat petani HIPPA adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. HIPPA Potre Tane Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada awalnya merupakan kelompok tani yang berpretasi di tingkat provinsi. Secara organisasi antara HIPPA dengan Kelompok tani merupakan satu kesatuan, karena kepengurusannya adalah sama. Tetapi secara kelembagaan berbeda, dimana kelompok tani berperan mengatur pola tanam dan HIPPA penyedia air irigasi untuk tanaman.

Pada Gambar 1.a, keterkaitan HIPPA dan kelompok tani semakin kuat. Pola tanam padi-padi-padi di areal persawahan membutuhkan ketersediaan air yang cukup selama setahun. Contoh: penyediaan dan pembagian air yang dilaksanakan oleh HIPPA di Wilayah Kabupaten Lamongan mendorong petani mengusahakan tanaman padi 3 kali dalam setahun. Pada Gambar 1.b, keterkaitan HIPPA dan Kelompok Tani masih cukup erat, karena kemampuan petani menghasilkan 2 kali panen padi selama setahun. Pola demikian, ditemukan di Wilayah Kabupaten Lamongan yang memanfaatkan ketersediaan air, tidak hanya untuk tanaman padi melainkan palawija dan budidaya ikan darat. Di Wilayah Bondowoso, sebagian kecil petani mampu menghasilkan panen padi selama 2 kali dalam setahun. Pada Gambar 1.c, keterkaitan HIPPA dengan Kelompok Tani berkurang atau kurang erat, karena petani hanya mampu menghasilkan panen 1 kali dalam setahun. Memasuki Musim Tanam I, ketersediaan air di tingkat usahatani cukup berlimpah, selain perolehannya dari air permukaan juga dipenuhi dari air hujan. Peran HIPPA masih sangat dibutuhkan, terutama menghindari terjadinya genangan air di areal persawahan. Di Wilayah Kabupaten Sumenep, Bangkalan, Bondowoso dan Situbondo, ketersediaan air berkurang pada Musim Tanam II dan III karena debit air turun, sehingga petani hanya mampu menghasilkan panen padi 1 kali.

B. Interelasi HIPPA dengan Dinas PU, Kelompok Tani dan Dinas Pertanian

Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani, Dinas PU dan Dinas Pertanian diilustrasikan dengan Diagram Venn pada Gambar 2.

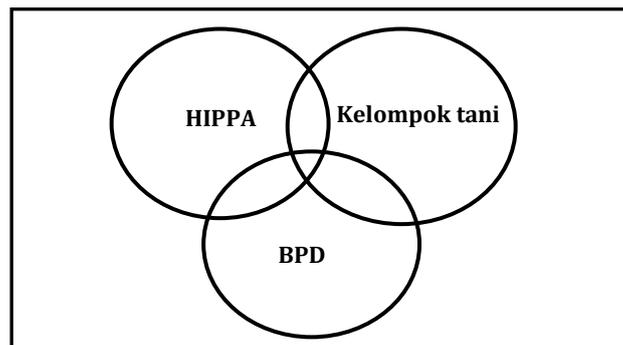


Gambar 2. Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani, Dinas PU dan Dinas Pertanian

Peran Dinas Pertanian melalui Petugas Penyuluh Lapang (PPL) adalah membina dan membimbing petani yang tergabung dalam kelompok tani dalam hal teknik budidaya tanaman, pengendalian hama dan penyakit hingga penanganan pasca panen. Perbaikan teknik budidaya tanaman di tingkat usahatani menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas, sekaligus pendapatan petani. Peningkatan pendapatan usahatani mendorong adanya balas jasa atau iuran petani terhadap pelayanan HIPPA, artinya seberapa besar iuran yang ditetapkan oleh HIPPA akan tetap terbayarkan seiring dengan peningkatan pendapatan usahatani. Sedangkan peran Dinas PU adalah membina HIPPA dari aspek teknis, operasi dan pemeliharaan serta manajemen organisasi, tetapi peran tersebut belum optimal oleh karena belum adanya Perda di Kabupaten/Kota.

C. Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani dan BPD

Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani dan BPD diilustrasikan dengan Diagram Venn pada Gambar 3.

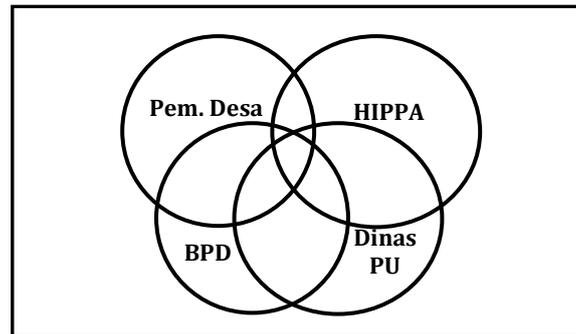


Gambar 3. HIPPA dengan Kelompok Tani dan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Program pengembangan kelompok tani selalu dikomunikasikan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Peran BPD adalah memfasilitasi segala bentuk permasalahan yang dihadapi kelompok tani, termasuk HIPPA. Keterkaitan HIPPA dengan BPD seharusnya menumbuhkan dampak positif terhadap pemberdayaan HIPPA, namun temuan dilapang justru berdampak negatif. Bentuk keterkaitan yang "membebani" HIPPA adalah (1) Pengalokasian dana HIPPA untuk oknum BPD. Jika pola tersebut berlanjut, maka tugas dan tanggungjawab HIPPA dalam membangun atau merehabilitasi jaringan irigasi di saluran tersier menjadi berat; dan (2) ikut menentukan proses pemilihan ketua sub blok. Padahal wewenang proses pemilihan sub blok adalah HIPPA, sedangkan peran BPD menurut UU. No 22 Tahun 1999 memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan desa.

D. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Desa, BPD dan Dinas PU

Interelasi HIPPA dengan Pemerintahan Desa, BPD dan Dinas PU diilustrasikan dengan Diagram Venn pada Gambar 4.

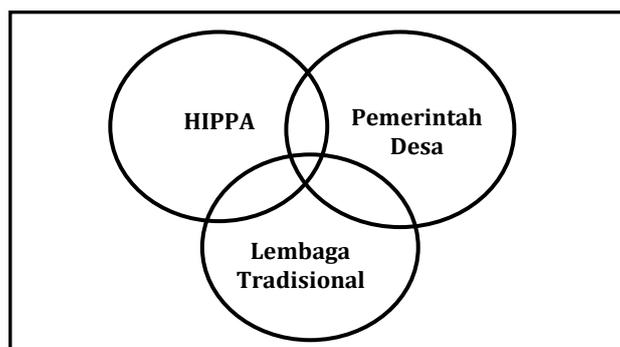


Gambar 4. HIPPA dengan Pemerintahan Desa, BPD dan Dinas PU

Berlakunya UU. No 22 Tahun 1999, desa ditempatkan sebagai daerah otonom. Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintahan desa. Penilaian aparat desa terhadap HIPPA adalah bahwa HIPPA merupakan bagian dari pemerintahan desa, karena berada di wilayah administrasinya. Padahal, HIPPA sebagai lembaga mandiri dan otonom, berhak mengurus rumahtangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun, Sejauh ini hubungan antara lembaga HIPPA dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya konflik. Bentuk keterkaitan yang ditemukan di lokasi penelitian bisa mendukung dan membebani lembaga HIPPA untuk menjadi mandiri. Interelasi yang mendukung HIPPA, meliputi: (1) menyediakan fasilitas perkantoran untuk HIPPA; (2) memberi masukan dalam penyusunan AD/ART dan Program Kerja; (3) memberikan bantuan subsidi pembangunan jaringan irigasi pada HIPPA-HIPPA di Kabupaten Sumenep, Lamongan dan Pasuruan; dan (4) ikut membantu HIPPA menghimpun iuran dari Anggota, seperti yang dilakukan HIPPA Candi Mas I Kabupaten Sumenep. Interelasi yang membebani HIPPA, meliputi: (1) intervensi terhadap pembentukan pengurus HIPPA, terutama pemilihan ketua HIPPA; dan (2) pengalokasian dana HIPPA untuk pembangunan desa. Interelasi HIPPA dengan Dinas PU yang mendukung adalah pembinaan HIPPA. Keterkaitan yang membebani adalah pengalokasian dana HIPPA untuk oknum petugas dinas atau juru pengairan dilapang.

E. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Tradisional

Interelasi HIPPA dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Tradisional diilustrasikan dengan Diagram Venn pada Gambar 5.



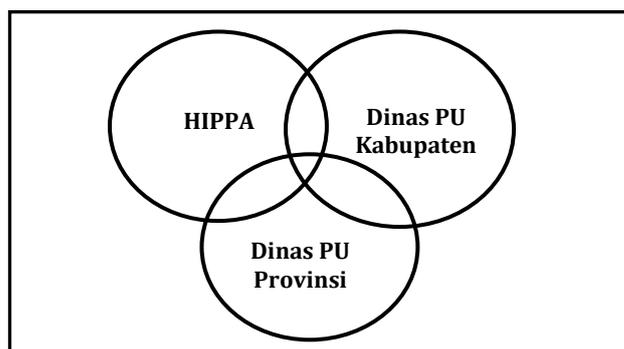
Gambar 5. HIPPA dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Tradisional

Sebelum adanya HIPPA, pengelolaan air irigasi dilakukan lembaga tradisional (*ulu-ulu* atau *jogotirto*) yang secara organisasi masuk dalam pemerintahan desa. Setelah HIPPA

diintroduksi, maka keberadaan lembaga tradisional tergeser, akan tetapi ulu-ulu masuk dalam kepengurusan, sebagai petugas teknis di lapang (kelompok atau *tokang torab* atau panitia). Keterkaitan antar lembaga dalam pengelolaan air irigasi yang dinilai mampu mendorong HIPPA menjadi mandiri dan otonom, hendaklah terus dikembangkan dan jika memungkinkan dibangun suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibangun berorientasi pada peningkatan pelayanan dan penyediaan air irigasi secara adil, merata dan efisien, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sejalan dengan harapan tersebut, maka upaya mendorong HIPPA menjadi mandiri dan otonom dibutuhkan tanggungjawab dan komitmen Stakeholder untuk tidak membebani HIPPA.

F. Interelasi HIPPA dengan Dinas PU Kabupaten dan Dinas PU Provinsi

Bentuk interelasi antara HIPPA dengan Dinas PU Kabupaten dan Dinas PU Provinsi diilustrasikan dalam Diagram Venn, pada Gambar 6.



Gambar 6. HIPPA dengan Dinas PU Kabupaten dan Dinas PU Provinsi

Secara struktural antara Dinas PU Kabupaten dan Dinas PU Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki hubungan kerja. Tetapi, dari sisi historis sebelum Otda kedua instansi tersebut pernah menjalin kerjasama yang kuat. Jaringan irigasi HIPPA yang menghubungkan langsung antara saluran primer menuju saluran tersier atau saluran kuarter pada lahan petani dibutuhkan interelasi antara HIPPA, Dinas PU Kabupaten yang bertanggungjawab di saluran sekunder dan Dinas PU Provinsi pada sungai lintas. Interelasi tersebut bukan hanya untuk kepentingan administratif melainkan koodinasi dalam operasi pengelolaan air irigasi untuk anggota HIPPA.

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA HIPPA DI WILAYAH PEDESAAN

Hasil analisis SWOT terhadap lembaga HIPPA tersebut dengan kategori berkembang/mandiri dan sedang berkembang dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan				
1.	Aktivitas pertanian di lahan beririgasi meningkat	0.07	3	0.21
2.	HIPPA bisa diterima sebagai lembaga pengelola air irigasi	0.09	4	0.36
3.	Terbentuk struktur HIPPA berdasar aspek hidrologis (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA)	0.05	2	0.10
4.	HIPPA memiliki pengurus dan keanggotaan yang jelas	0.07	3	0.21
5.	AD/ART sebagai landasan pengambilan keputusan dalam HIPPA	0.06	3	0.18
6.	HIPPA memiliki kewewenangan mengelola IPAIR	0.08	3	0.24
7.	HIPPA berbadan hukum memiliki wewenang mengelola	0.06	2	0.12

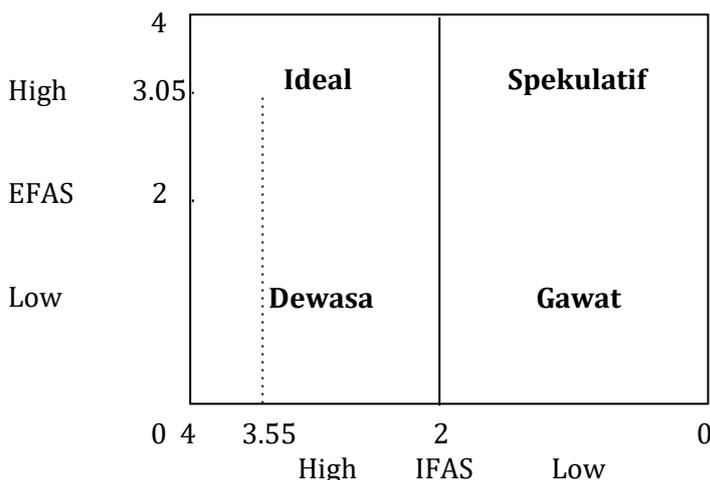
	jaringan tersier dan kuarter			
8.	Kondisi Jaringan irigasi tersier dan kuarter relatif baik	0.07	3	0.21
Kelemahan				
1.	Peran ketua dan pelaksana teknis lebih dominan dibandingkan pengurus lain	0.08	4	0.32
2.	Pemilihan pengurus belum menyuarkan kepentingan anggota	0.08	3	0.24
3.	Pengurus dikategorikan dalam usia kurang produktif	0.05	2	0.10
4.	Terjadi rangkap jabatan dalam kepengurusan HIPPA	0.05	1	0.05
5.	Manajemen administrasi relatif lemah	0.07	2	0.14
6.	AD/ART kurang tersosialisasikan dengan baik kepada anggota	0.07	3	0.21
7.	Mekanisme pengelolaan IPAIR relatif lemah	0.08	3	0.24
8.	Pengurus HIPPA kurang memiliki kemampuan secara teknis dalam pelaksanaan O & P	0.06	2	0.12
Nilai IFAS (*)				3.05

Keterangan: (*) Nilai IFAS menunjukkan nilai yang diperoleh dari penggabungan antara kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan HIPPA pedesaan sesuai dengan sampel.

Tabel 2. Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
Peluang				
1.	Berkembangnya sistem pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri	0.09	4	0.36
2.	Adanya Perubahan Kebijakan Pegelolaan Irigasi (PKPI)	0.07	3	0.21
3.	Penetapan Perda Propinsi dan Kabupaten tentang Irigasi	0.08	2	0.16
4.	Nota kesepakatan antar HIPPA/GHIPPA / IHIPPA/FHIPPA dalam pengelolaan irigasi	0.07	3	0.21
5.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder oleh pemerintah	0.07	3	0.21
6.	Kajian pengelolaan kelembagaan HIPPA semakin intensif	0.07	3	0.21
7.	Adanya interelasi antara HIPPA dengan lembaga lain	0.06	3	0.18
8.	Program pelatihan dan pembinaan dari instansi terkait	0.06	3	0.18
Ancaman				
1.	Sumberdaya air semakin langka	0.09	3	0.27
2.	Kuatnya pengaruh lembaga tradisional terhadap HIPPA	0.06	2	0.12
3.	Perda belum mampu melindungi kepentingan HIPPA dalam pengelolaan air irigasi	0.08	4	0.32
4.	Intervensi pemerintah terhadap HIPPA	0.08	4	0.32
5.	Dana pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder relatif rendah	0.07	3	0.21
6.	Setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum mengikutsertakan HIPPA	0.07	4	0.28
7.	Setiap instansi memiliki kepentingan yang berbeda terhadap HIPPA	0.05	2	0.10
8.	Program pelatihan dan pembinaan tidak dilakukan secara berkesinambungan	0.07	3	0.21
Nilai EFAS (*)				3.55

Keterangan: (*) Nilai EFAS menunjukkan nilai yang diperoleh dari penggabungan antara Peluang dan Ancaman dalam pengelolaan HIPPA pedesaan sesuai dengan sampel.



Gambar 7. Diagram Matrik Posisi Kompetitif Relatif

Berdasarkan diagram matrik posisi kompetitif relatif pada Gambar 7, dimana diperoleh nilai IFAS sebesar 3.55, artinya bahwa faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan pengelolaan lembaga HIPPA berada pada posisi pertumbuhan atau high. Sedangkan nilai EFAS 3.05 menunjukkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan masuk dalam pertumbuhan. Titik temu antara nilai IFAS dan EFAS menunjukkan lembaga HIPPA berada pada posisi Ideal, artinya HIPPA yang memiliki berbagai kekuatan dan kelemahan, tetapi didukung oleh peluang dan tantangan yang harus dihadapi, maka disimpulkan bahwa lembaga HIPPA yang terbentuk sejak 1978 mengalami pertumbuhan dan memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang.

Ilustrasi dari analisis SWOT terhadap kelembagaan HIPPA, adalah bahwa kekuatan HIPPA terletak pada sejauhmana lembaga tersebut bisa diterima dan diakui keberadaannya oleh semua lapisan masyarakat di wilayah pedesaan. Mengingat, HIPPA sebagai lembaga baru hadir dengan konsep manajemen modern, tentunya sama sekali berbeda dengan lembaga tradisional yang sebelumnya ada. Lembaga tradisional bentukan pemerintah desa dan masyarakat di lokasi studi di kenal dengan istilah “jogo tirta” atau “ulu-ulu banyu”. Dalam aktivitasnya, lembaga tradisional tidak memiliki stuktur organisasi yang jelas, sehingga sulit dipertanggungjawabkan keberadaannya kepada masyarakat.

Lembaga HIPPA merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang irigasi yang bersifat *Top-Down*. Tetapi, pendirian HIPPA di wilayah pedesaan merupakan desakan dari semakin meningkatnya aktivitas pertanian di lahan beririgasi di lokasi studi. Aktivitas pertanian yang meningkat tentunya membutuhkan pengelolaan sumberdaya air permukaan maupun air bawah tanah (*artesis*) secara efektif dan efisien. Hal ini mendesak dilakukan agar supaya sumberdaya air yang diperebutkan berbagai kepentingan baik sektor pertanian, industri maupun kebutuhan rumahtangga tidak menjadi langka.

Sesuai dengan konsep perubahan sosial, bahwa setiap perubahan kelembagaan yang terjadi di suatu masyarakat akan diikuti oleh perubahan lembaga lain. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan kuartier kepada HIPPA yang berbadan hukum merupakan langkah awal bagi lembaga tersebut untuk mulai bebenah diri dari sisi organisasi maupun finansial. Didukung pula oleh tipologi masyarakat yang berbeda antar wilayah penelitian di Jawa Timur. Kebijakan pengembangan teknologi dan informasi perlu dijalankan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Lembaga HIPPA (Soetriono, Soejono D. dkk 2019).

Untuk menuju lembaga HIPPA yang mandiri, otonom dan mengakar kuat di masyarakat, maka HIPPA di lokasi penelitian telah membentuk struktur organisasi dan

menentukan kepengurusan sesuai dengan kondisi sumberdaya manusia di tingkat lokalita. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka kerja atau SOP agar mampu tumbuh berkembang (Soejono, D., Zahrosa, D. B., dkk 2021) serta sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan lembaga HIPPA melalui penetapan Anggaran dasar dan Anggaran Rumahtangga (AD/ART).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. (a) Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani, (b) Interelasi HIPPA dengan Dinas PU, Kelompok Tani dan Dinas Pertanian, (c) Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani dan BPD, (d) Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Desa, BPD dan Dinas PU, (e) Interelasi HIPPA dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Tradisional, serta (f) Interelasi antara HIPPA dengan Dinas PU dan Dinas PU Prov. Jatim.
2. (a) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan kuartier kepada HIPPA yang berbadan hukum, (b) Kebijakan pengembangan teknologi dan informasi perlu dijalankan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Lembaga HIPPA, dan (c) Menyusun kerangka kerja atau SOP agar mampu tumbuh berkembang.

REFERENSI

- Amam, A., Soejono, D., Zahrosa, D. B., & Maharani, A. D. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DENGAN PENDEKATAN FORCE FIELD ANALYSIS. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 139–149.
- Dharma, A. (2013). *Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigasi*. Jakarta. http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh.
- Fatimah, P. L. R. (2018). Mengembangkan kualitas usaha milik desa (Q-BUMDes) untuk melestarikan ketahanan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan adaptif: Perancangan sistem kewirausahaan desa dengan menggunakan model tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122–132.
- Indonesia, P. R. (2006). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Cet. 9. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*.
- Nelvi, Y. (2019). Isu Dan Pembaharuan Pengelolaan Sistem Irigasi Review and Perspectives. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 3(2).
- Priyonugroho, A. (2014). *Analisis Kebutuhan Air Irigasi (Studi Kasus Pada Daerah Irigasi Sungai Air Keban Daerah Kabupaten Empat Lawang)*. Sriwijaya University.
- Rangkuti, F. (2016). *Teknik membedah kasus bisnis Analisis SWOT*.
- Samekto, C., & Winata, E. S. (2010). Potensi sumber daya air di Indonesia. *Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih Untuk Kabupaten/Kota Di Indonesia*, 1–20.

Sari, S., Achmar, M., & Zahrosa, D. B. (2020). Strategi optimalisasi penggunaan lahan marginal untuk pengembangan komoditas tanaman pangan. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 281–288.

Soetriono, R. H., & Hanafie, R. (2007). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian. *Yogyakarta: Andi*.

Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., & Amam, A. (2021). Performa Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 935–949.